

DAFTAR BACAAN

Buku

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakthi, Bandung

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kebijakan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, Undip, 2000

Endang Prasetyowati, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2010

Ibrahim Johnny, *Teori&Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, 2018

Mahmud Pieter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2005

Muhammad Koesno, *Kritik Terhadap Ilmu Hukum*, Lembaga Riset Dan Pengabdian Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

M Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori Dan Studi Kasus*, PT Revika Aditama, Bandung, 2012

Roesli Effendi dkk, "*Masalah Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*" Dalam BPHN Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Bina Cipta, Jakarta

Sjawie Hasbullah F, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2015

Soekanto Soerjono, *Kriminologi Suatu pengantar* Cetakan Pertama, Gh Indonesia, Jakarta,

Sudharto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1983.

Teguh Prasetyo Dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, 2012

Tim Redaksi BIP, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, 2014

Tim Viva Justicia, *Undang-Undang KPK*, Genesis Learning, Bantul,

Jurnal

Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti, *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol 6.No.3 Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional 1980 Semarang WWW, BPHN, Com. Diakses Pada Tanggal 12 Juli 2017

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung RI

Undang-undang No. 30 Tahun 2006 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 11 April Tahun 2018 Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keputusan Bersama Ketua KPK Dan Kejaksaan Agung RI No. KEP-1 11212005 No. KEP-IAIJ A11212005 Tentang Kerjasama Antar Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Agung RI Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur

Website/Internet Bisnis.tempo.co/amp/1148089/icw - sebut - jumlah - kasus - korupsi - dana - desa- meningkat-setiap-tahun

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2015, Petunjuk pelaksana

Bimbinganda konsultai Pengelolaan Keuangan Desa, Jakart Peraturan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur